KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KQ65NQ4R

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 1 8 6 4				Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	H.5 .	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 68 807 594 4 722 000						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : SUPRIYATUN						
<u> </u>						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG						
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
5 21-402-01	1.090.000	1.090.000	0	5	54.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota						
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026439245708077						
Nama Dokume	en Bukti Pembayaran	Tanggal 1 (	) <b>dd</b> 0 5	mm [	2 0 2 2 <i>уууу</i>	
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
Nomor: Tanggal dd yyyy						
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :						
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :						
O IDENTITAO DEMOTONO DA IAK						
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK  C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	16 2 722	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah :		RAH ATMA HUSADA MAHAK		ALIMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi :		п п пп			<del></del>	
C.4 Tanggal	1 2 dd 0 5 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan :	RIANDY					
	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	an Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
	Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperlu	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	mengatur bahwa d	okumen ini tela	ah ditandatangani secara	